

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub / Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Penguduan dan Lokasinya					
6	Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan)	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat No : 285/OR/2022	35	4	administratif	ya	Internal	Tersedia di Ruang Pelayanan				
			36	1	Jasa	ya	Internal					
			37	2	administratif		Internal					
			38	3	administratif	ya	Internal					
7	Sekretariat Daerah (Biro Organisasi)	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat No : 285/OR/2022	39	4	administratif		Internal					
			40	5	administratif		Internal					
			41	1	Jasa		Internal					
			42	2	Barang	ya	Internal, masyarakat					
8	Sekretariat Daerah (Biro Umum)	Keputusan Kepala Biro Umum No : 0210 Tahun 2020	43	3	Jasa		Internal	Tersedia diruang Kasubbag TU Biro Persuratan dan Arsip				
			44	4	Jasa		Internal					
			45	1	administratif	ya	Internal, Masyarakat					
			46	2	administratif	ya	Internal					
9	Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)	Keputusan Kepala Biro Kesra No : 400/KEsRA/2020	47	3	administratif	ya	Internal	Tersedia di Ruang Kasubbag TU Biro				
			48	4	Jasa		Internal					
			49	1	Jasa		Internal					
			50	2	administratif		Internal					
			51	3	Jasa		Internal					
			52	4	administratif		Internal					
			53	5	administratif	ya	Internal, Masyarakat, Badan hukum					
			54	6	administratif		Internal					
			55	7	administratif		Internal					
			10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Keputusan Kepala Dinas Kominfo No : 24/DISKOMINFO/2021	56	1		barang	ya	masyarakat, Pelaku Usaha, Internal	Tersedia Ruang khusus (Ruang Media Center)
						57	2		Jasa	ya	masyarakat, Pelaku Usaha, Internal	
						58	3		Jasa	ya	masyarakat, Pelaku Usaha, Internal	
59	4	Jasa					Internal					
60	5	Jasa				ya	Internal					
61	6	Jasa				ya	Internal					
62	7	administratif				ya	Internal					
63	8	Jasa				ya	Internal					
64	9	Jasa				ya	Internal					
65	10	Jasa				ya	Internal					
66	11	Jasa				ya	Internal					
67	12	Jasa				ya	Internal					
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Keputusan Kepala Dinas Dukcapil No : 63/2020	68	1	barang	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	tersedia di Ruang Sekretaris				
			69	2	Jasa	ya	masyarakat, Pelaku Usaha					
			70	3	Jasa		masyarakat, Pelaku Usaha, Internal					
			71	4	Jasa		masyarakat, Pelaku Usaha, Internal					
			72	1	Jasa		masyarakat, Pelaku Usaha					
12	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	Keputusan Direktur RSI Prov. Kalbar No : 091 Tahun 2020	73	2	Jasa		masyarakat, Pelaku Usaha	Tersedia di Lobi Kantor				
			74	3	Jasa		masyarakat, Pelaku Usaha					
			75	4	Jasa		masyarakat, Pelaku Usaha					
			76	5	Jasa		masyarakat, Pelaku Usaha					
			77	6	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha					
			78	7	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha					

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergab/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengaduan dan Lokasinya
115	31	Izin Pertambangan Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
116	32	Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
117	33	Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR/SIPR).	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
118	34	Izin Usaha Jasa Pertambangan(UJJP) Inti.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
119	35	Izin Usaha Jasa Pertambangan(UJJP) Non Inti.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
120	36	Izin Usaha Jasa Pertambangan(UJJP) Non Inti.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
121	37	Pencabutan Izin Usaha Pertambangan.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
122	38	Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
123	39	Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
124	40	Pengakhiran / Terminasi Izin Usaha Pertambangan.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
125	41	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas Bukan Logam dan Batuan. (Sungai)	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
126	42	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas Bukan Logam dan Batuan. (Bukan Wilayah Sungai)	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
127	43	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
128	44	Penetapan Jaminan Reklamasi.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
129	45	Penetapan Jaminan Pasca Tambang.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
130	46	Penetapan Jaminan Kesungguhan.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
131	47	Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
132	48	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPPTL) Non BUMD dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
133	49	Izin Operasi (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Kapasitas diatas 500 kVA dalam 1 Sistem Instalasi Tenaga Listrik.	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
134	50	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUPPTJ) bagi Badan Usaha Dalam Negeri	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
135	51	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin Yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
136	52	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyedia Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
137	53	Sertifikasi laik Operasi (SLO) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Milik Pemegang Izin Operasi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah yang tersambung pada Instalasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dimohonkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Penunjukan di Provinsi Kalimantan Barat	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
138	54	Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Barat	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
139	55	Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Barat	adminstratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergab/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengaduan dan Lokasinya
140			56 Penunjukan lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Barat	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
141			57 Penunjukan Kompetensi Tenaga Listrik Ketenagalistrikan Yang dimohonkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Penunjukan di Provinsi Kalimantan Barat	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
142			58 Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan yang dimohonkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Penunjukan di Provinsi Kalimantan Barat	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
143			59 Izin Usaha Niaga, Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 Ton/Tahun.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
144			60 Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
145			61 Izin Pengeboran Air Tanah	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
146			62 Izin Penggalian Air Tanah	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
147			63 Izin Pemaknaan Air Tanah	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
148			64 Izin Pengusahaan Air Tanah	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
149			65 Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (UKSP).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
150			66 Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
151			67 Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
152			68 Izin Pembukaan Kantor Cabang Kas Koperasi Simpan Pinjam.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
153			69 Izin Usaha Perkebunan Izin Usaha Produksi Benih (IUPB).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
154			70 Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
155			71 Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
156			72 Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (Budidaya dan Pengolahan).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
157			73 Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
158			74 Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
159			75 Izin Usaha Obat Hewan	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
160			76 Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan produk hewan/Ternak.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
161			77 Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak dan produk hewan/Ternak.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
162			78 Rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina Tanaman Pangan	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
163			79 Rekomendasi sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
164			80 Sertifikasi Kompetensi Produsen Benih Hortikultura	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
165			81 Sertifikasi Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
166			82 Izin Operasional Yayasan Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS)	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
167			83 Izin Lingkungan (AMDAL)	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
168			84 Izin Lingkungan (UKL-UPJ)	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
169			85 Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Skala Provinsi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
170			86 Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
171			87 Rekomendasi Kelayakan Lingkungan.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
172			88 Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPJ).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengaduan dan Lokasinya
173	89	Rekomendasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Skala Nasional.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
174	90	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
175	91	Perizinan : Surat Izin Penangkaran Ikan (SIPI) (Baru, Perubahan, Andon, Perpanjangan, Buddidaya)		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
176	92	Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI)		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
177	93	Tanda Daftar Perikanan Untuk Nelayan		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
178	94	Persetujuan Pengadaan Kapal		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
179	95	Surat Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (SIPWP3K)		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
180	96	Surat Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
181	97	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHNK) Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (Enam Ribu) meter kubik per tahun.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
182	98	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHNBK).		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
183	99	Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
184	100	Izin Tempat Penampungan Terdaftar Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
185	101	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
186	102	Izin Pengusahaan Wisata Alam.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
187	103	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
188	104	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
189	105	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
190	106	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
191	107	Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio Farmaka.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
192	108	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
193	109	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Luas dibawah 5 Ha Non Komersial.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
194	110	Pengeshan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (URKTPHHK-HA/ BKUPHHK-HA)		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
195	111	Pengeshan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Hasil Hutan Tanaman Industri (URKTPHHK/ BKUPHHK-HTI)		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
196	112	Pengeshan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (URKTPHHK-RE/ BKUPHHK-RE)		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
197	113	Surat Keputusan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Kayu Bulat/Olahah (TPR-KB/KO)		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
198	114	Surat Keputusan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara Dalam Hutan Negara		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
199	115	Persetujuan Pembuatan dan /atau Penggunaan Koridor.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
200	116	Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
201	117	Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
202	118	Rekomendasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem.		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
203	119	Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan		administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengabdian dan Lokasinya
204	120	Surat Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
205	121	Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
206	122	Sertifikat Distribusi Cabang Farnasi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
207	123	Sertifikat Distribusi Cabang Penyaur Alat Kesehatan.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
208	124	Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
209	125	Izin Transfusi Darah Tingkat Provinsi	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
210	126	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
211	127	Rekomendasi Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit. Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
212	128	Rekomendasi Penetapan Sarana Kesehatan Pemeriksa Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
213	129	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
214	130	Rekomendasi Registrasi Puskesmas.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
215	131	Rekomendasi Sertifikat Produk Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
216	132	Rekomendasi Distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
217	133	Rekomendasi Sertifikat Distribusi Farnasi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
218	134	Rekomendasi Sertifikat Produk Kosmetika.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
219	135	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan diluar Cara Ilmiah	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
220	136	Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Khusus	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
221	137	Izin Pembangunan dan Izin Operasional Prasarana Perkeretaapian Umum, Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
222	138	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum, Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
223	139	Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
224	140	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek (Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Pemadu Moda, Angkutan Perkotaan, Angkutan Perdesaan, Angkutan Perbatasan).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
225	141	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taksi, Angkutan Tujuan Tertentu : Angkutan Antar Jemput, Angkutan Sewa Khusus/Online, Angkutan Permikiman, Angkutan Karyawan)	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
226	142	Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Orang Lintas Batas Negara (ALBN) dan Antar Kota, Antar Provinsi (AKAP)	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
227	143	Persetujuan Pengujian Analisis Dampak Lalu Lintas Di Jalan Provinsi	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
228	144	Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
229	145	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		
230	146	Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan Pengumpan Regional.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha		

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengadaan dan Lokasinya
			231 147 Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			232 148 Izin Pekerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			233 149 Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			234 150 Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			235 151 Izin Membangun, Memindahkan / Membongkar Bangunan atau Instalasi pada Alur Pelayaran dan Danau Kelas II	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			236 152 Izin Pembangunan/Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			237 153 Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			238 154 Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			239 155 Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			240 156 Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transporasi (SIUJPT).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			241 157 Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAP).	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			242 158 Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			243 159 Izin Usaha Tally Mandiri.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			244 160 Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			245 161 Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			246 162 Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			247 163 Rekomendasi Penerbitan Izin Trayek Penyeberangan Yang Melayani Trayek Antar Provinsi.	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			248 164 Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			249 165 Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			250 166 Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			251 167 Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			252 168 Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya Untuk Dipatenkan	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			253 169 Surat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			254 170 Surat Izin Penguasaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			255 171 Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Provinsi	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			256 172 Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
			257 173 Rekomendasi Penelitian / Pendataan	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	
14	Dinas Kesehatan	Keputusan Kadis Kesehatan No : 48 Tahun	258 1 Penerbitan Surat Rekomendasi bagi Sertifikat Distribusi Cabang Alat Kesehatan	administratif	ya	masyarakat, Pelaku Usaha	Tersedia di ruang pelayanan publik

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengabdian dan Lokasinya
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Keputusan Kepala Dinas LHK No : 02.1/DLHK- /UAPR/2021	<p>288 9 Pelayanan Penilaian, Penetapan Angka Kredit, dan Penetapan Jabatan Fungsional bagi Guru Pertama Pangkat Penata Muda Gol/Ruang III/a s.d. Guru Madya Pangkat Pembina Gol/Ruang IV a;</p> <p>289 10 Rekomendasi Teknis Pendirian Sekolah SLB yang dikelola oleh</p> <p>290 11 Surat Pindah Peserta Didik SMA/SMK/SLB;</p> <p>291 12 Rekomendasi Teknis Pendidikan Sekolah SMA dan SLB yang dikelola oleh Masyarakat;</p> <p>292 13 Rekomendasi Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan</p>	<p>administratif</p> <p>administratif</p> <p>administratif</p> <p>administratif</p>	<p>ya</p> <p>ya</p> <p>ya</p> <p>ya</p>	<p>Internal</p> <p>masyarakat</p> <p>Internal</p> <p>masyarakat</p> <p>masyarakat</p>	Tersedia di ruang Kasubag TU
293	1 Penilaian Dokumen KA-ANDAL	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
294	2 Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
295	3 Penilaian Dokumen ADENDUM ANDAL RKL-RPL Tipe A	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
296	4 Penilaian Dokumen ADENDUM ANDAL RKL-RPL Tipe B	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
297	5 Penilaian Dokumen ADENDUM ANDAL RKL-RPL Tipe C	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
298	6 Penilaian Dokumen UKL- UPL	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
299	7 Penilaian Dokumen KA-ANDAL	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
300	8 Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
301	9 Penilaian Dokumen ADENDUM ANDAL RKL-RPL Tipe A	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
302	10 Penilaian Dokumen ADENDUM ANDAL RKL-RPL Tipe B	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
303	11 Penilaian Dokumen ADENDUM ANDAL RKL-RPL Tipe C	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
304	12 Penilaian Dokumen UKL- UPL	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
305	13 Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELIH)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
306	14 Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
307	13 Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
308	14 Pelayanan Pengabdian dan Pengawasan Lingkungan	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
309	15 Pertimbangan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Skala Nasional;	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
310	16 Pertimbangan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Skala Provinsi;	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
311	17 Pertimbangan Teknis Izin Pengusahaan Wisata Alam;	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
312	18 Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
313	19 Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Airan Air;	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
314	20 Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
315	21 Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
316	22 Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio-Farmaka	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
317	23 Penerbitan Pertimbangan Teknis Untuk Tukar Menukar Kawasan Hutan	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
318	24 Penerbitan Pertimbangan Teknis Pelepasan Kawasan Hutan;	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
319	25 Telaahan Teknis Status Kawasan Hutan;	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			
320	26 Penerbitan Pertimbangan Teknis Untuk Peranjanjian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HA/HTI/RE	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha			

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengaduan dan Lokasinya
			350 14 Standar Pelayanan Endoscopy	jasa		Masyarakat	
			351 15 Standar Pelayanan Pembayaran Selisih Pasien BPJS Kelas Perawatan Lebih Tinggi	jasa		Masyarakat	
			352 16 Standar Pelayanan Retribusi Jasa Pelayanan Umum Turai	jasa		Masyarakat	
			353 17 Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Peralatan	jasa		Masyarakat	
			354 18 Standar Pelayanan Farmasi	barang		Masyarakat	
			355 19 Standar Pelayanan Radiologi	jasa		Masyarakat	
			356 20 Standar Pelayanan Kamar Jenazah	jasa		Masyarakat	
			357 21 Standar Pelayanan Sanitasi	jasa		Masyarakat	
			358 22 Standar Pelayanan Gizi	jasa		Masyarakat	
			359 23 Standar Pelayanan Bank Darah	jasa		Masyarakat	
			360 24 Standar Pelayanan Patologi Anatomi	jasa		Masyarakat	
			361 25 Standar Pelayanan Laboratorium	jasa		Masyarakat	
			362 26 Standar Pelayanan Sterilisasi dan Binatu	jasa		Masyarakat	
			363 27 Standar Pelayanan Keamanan	jasa		Masyarakat	
			364 28 Standar Pelayanan Ambulance	jasa		Masyarakat	
			365 29 Standar Pelayanan Perpakiran	jasa		Masyarakat	
			366 30 Standar Pelayanan Logistik	jasa		Masyarakat	
			367 31 Standar Pelayanan Legalisir Surat Keterangan Sakit, Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Kematian	administratif		Masyarakat	
			368 32 Standar Pelayanan Rumah Singgah	jasa		Masyarakat	
			369 33 Standar Pelayanan Rekam Medis	administratif		Masyarakat	
			370 34 Standar Pelayanan Pengaduan	jasa	ya	Masyarakat	
			371 35 Standar Pelayanan Pemohonan Informasi	barang	ya	Masyarakat	
			372 36 Standar Pelayanan Peminjaman Dokumen Rekam Medis	barang		Masyarakat	
			373 37 Standar Pelayanan Penelitian	administratif		Masyarakat	
			374 38 standar Pelayanan Magang dan Studi Banding	administratif		Masyarakat	
			375 39 Standar Pelayanan Praktik Klinik	administratif		Masyarakat	
19	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan No : 800.05/SK/672/DISBUNNA K-A.2	376 1 Pertimbangan Teknis Izin Usaha Produksi Benih (IUPB)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	Tersedia di Ruang Kasi
			377 2 Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-8)	administratif	ya	Masyarakat, pelaku Usaha	
			378 3 Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			379 4 Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (Budidaya dan Pengolahan)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			380 5 Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			381 6 Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			382 7 Pertimbangan Teknis Izin Usaha Obat Hewan	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			383 8 Pertimbangan Teknis Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			384 9 Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pemasukan Hewan I Ternak dan Proctuk Hewan I Ternak	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengadaan dan Lokasinya	
24	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Keputusan Kadis Ketahanan Pangan No : 067 Tahun 2021	416	1 Layanan Penjualan Produk Pertanian dan bahan pangan di Toko Tani Indonesia (TTC)/Pasar Mitra Tani (PMT)	barang		Masyarakat, Pelaku Usaha	Tersedia di Ruang Khusus
			417	Surat Rekomendasi Izin Usaha Distributor Obat Hewan			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
			418	Penerbitan Sertifikat Veteriner			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
			419	Penerbitan Sertifikat bebas Pullorum			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
			420	Penerbitan Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
			421	Surat Pertimbangan Teknis Pemasukan dan Pengeluaran Produk Ternak			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
			422	Surat Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pengeluaran Ternak Unggas			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
			423	Surat Pertimbangan Teknis Rekomendasi Pengeluaran Ternak Besar			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
			424	2 Layanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	barang	ya	Intern, Masyarakat, Pelaku Usaha	
			425	3 Layanan Penerbitan Sertifikasi Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			426	4 Layanan Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keputusan Kadis PMD No : 006/DPMD/2021	427	1 Konsultasi	jasa		Masyarakat, Badan Hukum, Internal	di Ruang Subbag Umum dan Aparatur
			428	2 Penyediaan Data dan Informasi	barang	ya	Masyarakat, Badan Hukum, Internal	
			429	3 Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain	jasa		Masyarakat, Badan Hukum, Internal	
			430	4 Penyediaan Narasumber	jasa		Masyarakat, Badan Hukum, Internal	
			431	1 Pelayanan Konsultasi;	jasa		Pelaku Usaha	
26	Dinas Perhubungan	Keputusan Kepala Dinas Perhubungan No : 10/1 Tahun 2021	432	2 Pelayanan Permohonan Data dan Informasi/Laporan;	barang	ya	Pelaku Usaha	Tersedia di Ruang Kasubag Umum dan Aparatur
			433	3 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya melintasi batas daerah Kab/Kota	administratif	ya	Pelaku Usaha	
			434	4 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;	administratif	ya	Pelaku Usaha	
			435	5 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringanya Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	administratif	ya	Pelaku Usaha	

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Perhub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengadaan dan Lokasinya
436			6 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan angkutan Orang Dalam Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Pemadu Moda, Angkutan Perkotaan, Angkutan Perdesaan, Angkutan Perbatasan	administratif	ya	Pelaku Usaha	
437			7 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan Taksi, angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan Taksi, Permutkman, Angkutan Karyawan.	administratif	ya	Pelaku Usaha	
438			8 Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Orang Antar Lintas Batas Negara (ALBN) dan Antar Kota, Antar Provinsi (AKAP);	administratif	ya	Pelaku Usaha	
439			9 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas dijalan Provinsi;	administratif	ya	Pelaku Usaha	
440			10 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;	administratif	ya	Pelaku Usaha	
441			11 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam wilayah Provinsi	administratif	ya	Pelaku Usaha	
442			12 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;	administratif	ya	Pelaku Usaha	
443			13 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional.	administratif	ya	Pelaku Usaha	
444			14 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis tzin p kerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional.	administratif	ya	Pelaku Usaha	
445			15 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;	administratif	ya	Pelaku Usaha	
446			16 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;	administratif	ya	Pelaku Usaha	
447			17 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Membangun Memindahkan/ Membongkar Bangunan atau Instalasi pada Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II.	administratif	ya	Pelaku Usaha	
448			18 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Pembangunan/Pengoperasian/ Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II.	administratif	ya	Pelaku Usaha	
449			19 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang beroperasi pada Lintas Pelabuhan Kab/Kota Dalam Daerah Provinsi Pelabuhan Antar Daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional.	administratif	ya	Pelaku Usaha	
450			20 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan danau untuk Kapal yang melayani Trayek Daerah Dalam Wilayah Provinsi.	administratif	ya	Pelaku Usaha	
451			21 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).	administratif	ya	Pelaku Usaha	
452			22 Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPT).	administratif	ya	Pelaku Usaha	
453			23 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAP).	administratif	ya	Pelaku Usaha	

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Perpub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengadaan dan Lokasinya	
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM No : 38/Tahun 2021	454	24 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	Tersedia di Front Office
			455	25 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Tally Mandiri.	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			456	26 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perusahaan Depo Peti	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			457	27 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Pengembangan Pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpulan Regional.	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			458	28 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			459	29 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Penerbitan Izin Trayek Angkutan Penyeberangan yang melayani Trayek Antar Provinsi.	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			460	30 Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			461	31 Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara.	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			462	32 Pertimbangan Teknis Ketinggian Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			463	1 Pelayanan Konsultasi	Jasa	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			464	2 Pelayanan Data/Laporan/Informasi Koperasi dan UMKM	barang	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			465	3 Pertimbangan teknis izin usaha Simpan Pinjam	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			466	4 Pertimbangan Teknis Jjin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			467	5 Pertimbangan Teknis Jjin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
468	6 Pertimbangan Teknis Jjin Pembukaan Kantor Kas Koperasi	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha				
469	7 Fasilitasi Rapat/Audiensi Perkoperasian dan UKM	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha				
470	8 Penyediaan Narasumber/Penyuluhan Perkoperasian dan UKM	Jasa	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha				
28	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Keputusan Kadis PORAPAR No : 178 tahun 2020	471	1 Konsultasi	Jasa	ya	Internal, Pelaku Usaha, Masyarakat	Tersedia di Ruang Kasubbag Umum dan Aparatur
			472	2 Data dan Informasi Pariwisata	barang	ya	Internal, Pelaku Usaha, Masyarakat	
			473	3 Rekomendasi Lomba Paskibraka Tingkat Provinsi	administratif	ya	Masyarakat	
			474	4 Penyediaan Narasumber	Jasa	ya	Internal, Pelaku Usaha, Masyarakat	
			475	5 Rekomendasi Penyelenggaraan Olahraga	administratif	ya	Masyarakat	
			476	6 Fasilitasi Penggunaan sarana Olahraga	Jasa	ya	Masyarakat	
			477	1 Layanan Pendaftaran Kartu Anggota Perpustakaan	barang	ya	Masyarakat	
			478	2 Layanan Baca di Tempat	Jasa	ya	Masyarakat	
			479	3 Layanan Sirkulasi Perminjaman Buku	Jasa	ya	Masyarakat	
			480	4 Layanan Sirkulasi perpanjangan perminjaman buku	Jasa	ya	Masyarakat	
			481	5 Layanan Sirkulasi Pengembalian Buku	Jasa	ya	Masyarakat	
			482	6 Layanan Surat Keterangan Bebas Pustaka	administratif	ya	Masyarakat	
			483	7 Layanan Internet	Jasa	ya	Masyarakat	
			484	8 Layanan Perpustakaan Keliling	Jasa	ya	Masyarakat	
485	9 Layanan Referensi	Jasa	ya	Masyarakat				
486	10 Layanan Baca di Tempat Koleksi Deposit	Jasa	ya	Masyarakat				
487	11 Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	administratif	ya	Masyarakat				
488	12 Layanan Salinan Dokumen Koleksi Deposit	administratif	ya	Masyarakat				
489	13 Layanan Memeroleh Nomor Pokok Perpustakaan	administratif	ya	Masyarakat				
490	14 Layanan Akreditasi Perpustakaan Melalui APBN	administratif	ya	Masyarakat				
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Keputusan Kadis DPK No : 62/DPK/2021						

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengaduan dan Lokasinya	
30	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	Keputusan Kadis Kelautan dan Perikanan No : 165 Tahun 2020	491	15 Layanan <i>Library Credit Center</i>	jasa		Masyarakat	Tersedia di Ruang Khusus
			492	16 Layanan Penilaian dan Penyusutan Arsip	administratif		Masyarakat	
			493	17 Layanan Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	jasa		Masyarakat	
			494	18 Layanan Perawatan dan Pemeliharaan Arsip	jasa	ya	Masyarakat	
			495	19 Layanan Bimtek Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	jasa	ya	Masyarakat	
			496	20 Layanan Evaluasi Penerapan Arsip	administratif		Masyarakat	
			497	21 Layanan Pengawasan Kearsipan	administratif		Masyarakat	
			498	1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			499	2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			500	3 Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			501	4 Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			502	5 Persetujuan Pengadaan Kapal	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			503	6 Surat Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (SIPPWP3K)	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			504	7 Surat Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.	administratif	ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
			505	1 Standar Pelayanan Konsultasi	jasa		Internal, Pelaku Usaha, Masyarakat	
			506	2 Standar Pelayanan Data / Laporan / Informasi terkait pertanian	barang	ya	Internal, Pelaku Usaha, Masyarakat	
			507	3 Standar Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain	jasa		Internal, Pelaku Usaha, Masyarakat	
			508	4 Penyediaan Narasumber	jasa		Internal, Pelaku Usaha, Masyarakat	
			509	5 Pelayanan Promosi dan Publikasi	administratif	ya	Internal, Pelaku Usaha, Masyarakat	
			510	6 Menerima Magang SMK/Mahasiswa	administratif		Internal, Pelaku Usaha, Masyarakat	
			31	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Keputusan Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura No : 284 Tahun 2020	511	1 Pelayanan Konsultasi/Koordinasi:	
512	2 Pelayanan Data dan Informasi:	barang				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
513	3 Pelayanan Fasilitas Sebagai Saksi Ahli:	administratif					Masyarakat, Pelaku Usaha	
514	4 Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah atau Lembaga Lain:	jasa					Masyarakat, Pelaku Usaha	
515	5 Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
516	6 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Industri	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
517	7 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
518	8 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Pertuisan Industri (IPI)	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
519	9 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Persetujuan Pindah Lokasi	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
520	10 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUPMB) Toko Bebas Bea	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
521	11 Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (IUP B2) Pengecer Terdaftar	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
522	12 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Persetujuan Izin Usaha beralkohol (IUPMB) bagi distributor perdagangan Minuman	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
523	13 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Non BUMN dan Penjualan Tenaga Listrik serta	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
524	14 Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Izin Operasi (Izin Usaha Untuk Keperentingan Sendiri, total kapasitas lebih dari 500 KVA dalam 1 sistem Instalasi tenaga Penyediaan Tenaga Listrik	administratif				ya	Masyarakat, Pelaku Usaha	
32	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Keputusan Kepala Dinas Perindag ESDM No : 03 Tahun 2021						

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna layanan	Ketersediaan Ruang Pnggunaan dan Lokasinya	
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Keputusan Kepala BPSDM No : 065/31/BPSDM-A	581	18 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN	administratif		Internal	Tersedia di Ruang Subbag Umum Apartur
			582	19 Pemberhentian karena mencapai BUP, meninggal dunia, karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani dilindungi Pemprov Kalbar	administratif		Internal	
			583	20 Pemberhentian atas permintaan sendiri PNS di lingkungan Pemprov. Kalbar	administratif		Internal	
			584	21 Pemberhentian karena tewas PNS dilindungi Pemprov. Kalbar	administratif		Internal	
			585	22 Pemberhentian karena melakukan tindakan pidana/penyelenggaraan di lingk. Pemprov. Kalbar	administratif		Internal	
			586	23 Pemberhentian sementara PNS di lingkungan Pemprov. Kalbar	administratif		Internal	
			587	24 Pengelolaan data kepegawaian	administratif	ya	Internal	
			588	25 Pemberian ijin perkawinan kedua/ketiga/keempat bagi PNS Pria di lingkungan Prov. Kalbar	administratif		Internal	
			589	26 Pengantugrahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya (SLKS) kepada PNS di lingkungan Pemprov. Kalbar	administratif		Internal	
			590	27 Pembuatan KARIS/KARSU	administratif		Internal	
			591	28 Permohonan ijin belajar	administratif		Internal	
			38	Badan Penelitian dan Pengembangan	Keputusan Kepala Balitbang No : 44 Tahun 2020	594	1 Fasilitasi Pengajuan Paten Hak Kekayaan Intelektual	
595	2 Pertimbangan Teknis Rekomendasi Penelitian/Pendataan	administratif					masyarakat, badan hukum	
596	3 Penerbitan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	administratif				ya	masyarakat, badan hukum	
597	4 Lomba Karya Ilmiah (KI) dan Lomba Karya Perakarya (LKP)/Lomba Inovasi Daerah (IDA)	administratif					Internal, masyarakat, Badan hukum	
39	Badan Penghubung	Keputusan Kepala Badan Penghubung No : 065/26/TU	598	1 fasilitasi penyewaan mess dan anjungan daerah kalbar TMI	jasa		Masyarakat	Tersedia di Ruang Subbag Umum Apartur
			599	2 fasilitasi pembinaan mahasiswa dan masyarakat kalbar	administratif		Masyarakat	
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Keputusan Kepala BPBD No : 489 Tahun 2020	600	1 Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	barang		Masyarakat	Tersedia di Ruang Subbag Umum Apartur
			601	2 Manajemen bantuan logistik dan peralatan	administratif		Masyarakat	
			602	3 Rehabilitasi dampak sosial ekonomi pascabencana	administratif		Masyarakat	
			603	4 Penanggulangan Bencana	administratif		Masyarakat	
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Keputusan Kepala Badan Kesbangpol No : 99 Tahun 2021	604	1 Data/ Informasi / Laporan	barang	ya	Internal, masyarakat, Badan hukum	Tersedia di Ruang Kasi
			605	2 Konsultasi Terkait Kelemabatan	jasa		Internal, masyarakat, Badan hukum	
			606	3 Audensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Lembaga	jasa		Internal, masyarakat, Badan hukum	
			607	4 Pelayanan Pendaftaran Ormas	administratif		masyarakat, Badan hukum	
526	UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI PONTIANAK		608	Layanan Pelatihan Kepada Masyarakat			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
527	UNIT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG		609	Layanan Pelatihan Kepada Masyarakat			Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
42	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Keputusan Kepala BPPD No : 065/17/BPPD-A/2021	610	1 Pelayanan Konsultasi	jasa		Internal, Masyarakat, Pelaku usaha	Tersedia Ruang Pelayanan
			611	2 Pelayanan Data, Laporan, dan Informasi	barang	ya	Internal, Masyarakat, Pelaku usaha	
			612	3 Fasilitasi Rapat/Audensi Instansi Pemerintah, Pemda dan Lembaga Lain	jasa		Internal, Masyarakat, Pelaku usaha	
			613	4 Pelayanan Penyediaan Narasumber	jasa		Internal, Masyarakat, Pelaku usaha	

No.	Nama PD / Unit Pelayanan Publik	Pergub/ Keputusan Kepala PD terkait pelayanan yang diselenggarakan	Jenis Layanan	Ruang Lingkup (Administratif / Jasa / Barang)	Online & Terintegrasi	Pengguna Layanan	Ketersediaan Ruang Pengadaan dan Lokasinya	
43	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman No : 56 Tahun 2020	614	1. Pelayanan Data dan Informasi	barang	ya	Masyarakat dan Pelaku Usaha	Tersedia di Ruang Kasubdag TU Biro
			615	2. Pelayanan Konsultasi/Penyuluhan	jasa		Masyarakat dan Pelaku Usaha	
			616	3. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	administratif		Masyarakat, Badan hukum	
			617	4. Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Gedung Negara	administratif		Masyarakat dan Pelaku Usaha	
44	Badan Pendapatan Daerah	Keputusan Kepala Bapenda No : 115.2 Tahun 2020	618	1. Pelayanan Konsultasi dan koordinasi	jasa		Internal	Tersedia di Ruang sekretariat
			619	2. Pelayanan permintaan Data dan Informasi	barang	ya	Internal	
			620	3. Pelayanan penetapan kebijakan pendapatan daerah	administratif		Internal	
45	Sekretariat DPRD	Keputusan Sekretaris DPRD Prov. Kalbar No. 119 Tahun 2020	621	1. Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	administratif		Internal	Tersedia di Ruang sekretariat
			622	2. Fasilitasi Rapat Kerja Anggota DPRD	administratif		Masyarakat, Badan hukum	
			623	3. Pengaduan Masyarakat	jasa	ya	Masyarakat, Badan hukum	
			624	4. Demo dan Aspirasi Masyarakat	administratif		Masyarakat, Badan hukum	
			625	5. Hearing dan Audiensi Masyarakat	administratif		Masyarakat, Badan hukum	
TOTAL YANG ONLINE DAN TERINTEGRASI					410			

Pontianak, 31 Januari 2023

Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat

